



Peran Dana Desa dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa di Kabupaten Kediri

**Achsina Hawa Ilmiawan^{1*}, Alfinda Sallimma Syafitri², Alda Melinda³,
Helyanifa Gadistriani⁴**

¹⁻⁴Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Email: achsinahawa14@gmail.com^{1*}, findasalma54@gmail.com², melindaalda623@gmail.com³,
gadistrianihelyanifa@gmail.com⁴

*Korespondensi Penulis

Abstract. This study aims to examine and analyze the role of Village Funds in the development of infrastructure and public facilities in Gedangsewu Village, Pare Subdistrict, Kediri Regency. The research is motivated by the importance of Village Funds as a key instrument for community-based development and the improvement of rural welfare. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through field observations, in-depth interviews with village officials and community members, and a review of planning documents and financial reports. The findings indicate that Village Funds have made a significant contribution to the development of various village facilities and infrastructure, including roads, bridges, irrigation systems, religious facilities, and sanitation programs. Village Fund management is carried out through village deliberations, needs-based planning, transparent and accountable financial management, and regular coordination among village authorities. However, the implementation of development programs still faces several challenges, such as regulatory changes, budget limitations, and bureaucratic constraints. Community participation plays a crucial role in supporting the success, sustainability, and effectiveness of village development. Overall, the utilization of Village Funds has improved mobility, economic productivity, and the quality of life of the people of Gedangsewu Village.

Keywords: Facilities and Infrastructure; Gedangsewu Village; Village Development; Village Funds; Village Infrastructure

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran Dana Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana di Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya Dana Desa sebagai instrumen utama pembangunan berbasis kebutuhan lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan perangkat desa dan masyarakat, serta studi literatur terhadap dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan berbagai sarana dan prasarana desa, meliputi pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, jaringan irigasi, fasilitas keagamaan, serta program sanitasi dan lingkungan. Pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui mekanisme musyawarah desa, perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta koordinasi rutin antar aparatur desa. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti perubahan regulasi, keterbatasan anggaran, dan kompleksitas birokrasi. Partisipasi aktif masyarakat terbukti menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan, keberlanjutan, dan efektivitas pembangunan desa. Secara keseluruhan, pemanfaatan Dana Desa mampu meningkatkan mobilitas, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat Desa Gedangsewu.

Kata kunci: Dana Desa; Desa Gedangsewu; Infrastruktur Desa; Pembangunan Desa; Sarana dan Prasarana

1. LATAR BELAKANG

Kediri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan wilayah di bagian selatan Sungai Brantas (Pemerintah Kabupaten Kediri, 2022). Secara geografis, Kabupaten Kediri memiliki bentang alam yang beragam, mulai dari dataran rendah, kawasan pertanian produktif, hingga wilayah perbukitan yang memengaruhi pola pemanfaatan ruang dan aktivitas ekonomi masyarakat

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2023). Keberagaman kondisi fisik wilayah tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang utama perekonomian daerah, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja dan ketahanan pangan lokal (Maulana & Maulana, 2023). Selain sektor pertanian, perkembangan sektor perdagangan dan industri pengolahan turut berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah seiring dengan peningkatan infrastruktur dan konektivitas desa (Harianto, 2021). Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan yang berkelanjutan juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat daya saing wilayah Kabupaten Kediri dalam jangka menengah hingga panjang (Putra et al., 2023).

Di antara wilayah yang berkontribusi terhadap perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Kediri adalah Desa Gedangsewu yang berada di Kecamatan Pare (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2023). Desa Gedangsewu merupakan salah satu desa yang aktif dalam memanfaatkan Dana Desa sebagai instrumen utama pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik di tingkat lokal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2022). Pemanfaatan Dana Desa diarahkan untuk mendukung pembangunan desa yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat (Suryani & Hidayat, 2021). Dana Desa yang diterima setiap tahunnya menjadi sumber pendanaan utama bagi pemerintah desa dalam memperbaiki sarana, prasarana, serta pelayanan dasar masyarakat desa (Putra et al., 2023).

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Gedangsewu mencakup berbagai sarana dan prasarana strategis, seperti pembangunan jalan desa, jembatan, serta jaringan irigasi (Rahmawati & Nugroho, 2020). Infrastruktur jalan dan jembatan berperan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat serta memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi desa (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Sementara itu, pembangunan dan perbaikan irigasi memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan ekonomi rumah tangga petani desa (Prasetyo et al., 2022). Secara keseluruhan, keberadaan sarana dan prasarana desa yang memadai mampu mendukung aktivitas ekonomi warga, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2024).

Selain itu, pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Gedangsewu dinilai efektif, transparan, dan tepat sasaran, karena pengalokasianya disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat melalui proses musyawarah desa. Setiap tahun, Dana Desa mampu memberikan dampak positif yang nyata, baik dalam peningkatan fasilitas umum maupun pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Desa Gedangsewu mampu memanfaatkan anggaran desa secara optimal untuk mendorong percepatan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pembangunan yang terus dilakukan, Desa Gedangsewu kini memiliki fondasi yang semakin kuat dalam mendukung mobilitas masyarakat, meningkatkan layanan publik, serta memperkuat struktur ekonomi desa. Hal ini menjadikan Desa Gedangsewu sebagai salah satu contoh desa yang berhasil mengoptimalkan Dana Desa untuk menciptakan perubahan nyata di tingkat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, penyusun melakukan penelitian di Rumah Bapak Kepala Desa di Desa Gedangsewu yang berlokasi di Jl. Supriadi, Gedangsewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64214. Penelitian ini merupakan penelitian dekskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Gedangsewu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan lingkungan yang cukup beragam. Sebagai desa dengan jumlah penduduk yang terus berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai juga semakin meningkat. Kehidupan masyarakat di Desa Gedangsewu tidak bertumpu pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama, sehingga kondisi ekonomi warganya lebih beragam dengan aktivitas yang tersebar pada sektor jasa, perdagangan, buruh, dan usaha mandiri. Keragaman mata pencaharian ini menuntut adanya fasilitas umum yang lebih baik untuk mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari.

Secara geografis, desa ini terdiri atas kawasan permukiman yang saling terhubung oleh jaringan jalan antar dusun. Namun, beberapa akses masih memerlukan peningkatan kualitas agar pergerakan masyarakat lebih lancar, terutama menuju pusat kegiatan sosial dan ekonomi. Selain jaringan jalan, Desa Gedangsewu juga memiliki sejumlah fasilitas sosial dan keagamaan seperti mushola, ponden, dan makam leluhur yang masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini mencerminkan kuatnya nilai budaya dan spiritual yang tetap dijaga oleh warga setempat.

Kondisi sarana dan prasarana dasar di desa juga menunjukkan kebutuhan untuk ditingkatkan, seperti sarana sanitasi, dan beberapa fasilitas umum lain yang menunjang kesejahteraan warga. Sebuah penelitian oleh Hidayah dan Mukhlis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang di danai oleh dana desa dapat meningkatkan akses terhadap sanitasi dan air bersih, terutama di daerah dengan tingkat partisipasi informal yang tinggi (Hidayah & Mukhlis, 2019). Tantangan berupa kerusakan akses jalan akibat kendaraan berat serta kondisi cuaca tertentu juga menjadi perhatian yang perlu penanganan jangka panjang. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas yang sudah ada masih perlu diperkuat agar sarana dan prasarana desa dapat digunakan secara berkelanjutan.

Dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis tersebut, Desa Gedangsewu membutuhkan dukungan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih terarah dan berkelanjutan. Peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan mendasar agar aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar, meningkatkan produktivitas. Dengan pengelolaan dana desa yang efektif, masyarakat desa dapat memperoleh peningkatan kualitas hidup seluruh warga desa (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Peran Dana Desa

Pembangunan sarana dan prasarana di desa selama ini tidak lepas dari peran penting Dana Desa yang menjadi sumber utama pembiayaan berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui dana tersebut, desa mampu mewujudkan beragam pembangunan yang sebelumnya sulit direalisasikan, terutama karena keterbatasan anggaran. Pengoptimalan pengelolaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal (Mustofa, 2023). Salah satu bentuk pemanfaatannya terlihat pada pembangunan jalan desa, baik melalui pengaspalan maupun pengecoran. Jalan pemukiman dan jalan umum yang dibangun memberikan kemudahan mobilitas bagi warga, memperlancar aktivitas ekonomi, dan memperkuat hubungan antarwilayah di dalam desa.

Tidak hanya jalan, Dana Desa juga dimanfaatkan untuk membangun jembatan yang menghubungkan antar-kampung maupun antar-RW. Keberadaan jembatan baru membuat akses warga menjadi lebih cepat dan aman, sekaligus mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam sektor pertanian, Dana Desa berperan besar dalam pembangunan dan rehabilitasi irigasi. Proyek irigasi ini menjadi sangat penting karena mampu meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung ketahanan pangan, serta membantu petani menekan biaya produksi. Sebelum adanya Dana Desa, pembangunan irigasi termasuk jarang

dilakukan karena keterbatasan pendanaan, sehingga keberadaannya kini memberikan dampak besar bagi keberlanjutan pertanian desa.

Selain membangun sarana fisik, Dana Desa juga menyentuh kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat. Pembangunan mushola sebagai tempat beribadah, yang jumlahnya mencapai sekitar sebelas unit, menjadi bukti bahwa dana ini turut memperhatikan aspek keagamaan warga. Pemeliharaan punden dan makam leluhur juga mendapatkan perhatian, mengingat tempat-tempat tersebut memiliki nilai sejarah dan spiritual yang penting bagi masyarakat desa. Upaya ini secara tidak langsung berkontribusi pada pelestarian budaya lokal.

Program jambanisasi pun menjadi bagian dari pemanfaatan Dana Desa. Melalui pembangunan WC bagi warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak, desa berupaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Akses sanitasi yang memadai membantu mengurangi risiko penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, Dana Desa menjadi pendorong utama dalam pembangunan sarana dan prasarana desa, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Meskipun terdapat dukungan dari sumber lain seperti dana mandiri masyarakat, Dana Desa tetap menjadi landasan utama yang memungkinkan pembangunan strategis berjalan dengan baik. Kehadirannya tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Adapun dampak pembangunan sarana dan prasarana tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. Akses transportasi dan distribusi pertanian menjadi lebih lancar, sehingga aktivitas ekonomi warga berlangsung lebih efisien.
2. Produksi pertanian meningkat dan biaya operasional berkurang, terutama berkat pembangunan irigasi yang mengurangi ketergantungan petani terhadap pompa diesel.
3. Pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara tidak langsung, karena sarana dan prasarana yang lebih baik mendorong aktivitas ekonomi yang lebih stabil dan produktif.

Manajemen Dana Desa Dalam Pembangunan: Perencanaan, Pengelolaan, Koordinasi, Dan Hambatan Implementasi

Proses Perencanaan dan Musyawarah Desa

Perencanaan pembangunan desa pada dasarnya diawali melalui mekanisme musyawarah dusun yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Forum ini menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan, mengidentifikasi persoalan di lingkungannya, serta merumuskan prioritas program pembangunan. Aspirasi tersebut kemudian dihimpun oleh pemerintah desa

dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan kesesuaianya dengan arah kebijakan desa dan kemampuan anggaran yang tersedia. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat legitimasi proses perencanaan, tetapi juga meningkatkan relevansi program pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat tidak titerlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, hal itu dapat menyebabkan ketidak sesuaian antara kebutuhan masyarakat dan bagaimana dana tersebut digunakan. Akibatnya, dampak positif dari program tersebut akan berkurang (Malik, 2023).

Penyesuaian Perencanaan dengan Kondisi Lokal dan Regulasi

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan, pemerintah desa harus mempertimbangkan berbagai kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Ketentuan mengenai pembatasan pembangunan jalan baru serta prioritas pembangunan Sarana dan Prasarana irigasi, misalnya, menuntut desa untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana yang telah dirumuskan. Pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan dapat mengurangi manfaat pembangunan (Jamaluddin et al., 2018), perubahan regulasi yang terjadi di tengah proses sering kali menyebabkan desa perlu merevisi dokumen perencanaan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyesuaian ini menjadi bagian penting dari dinamika perencanaan desa, khususnya untuk menjaga legalitas pelaksanaan program dan memastikan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan pemerintah.

Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan Dana Desa dilakukan secara sistematis dengan pembagian tugas yang jelas antara bendahara desa, kepala urusan, serta perangkat terkait lainnya. Setiap transaksi dicatat secara terperinci dan diawasi melalui sistem pelaporan online yang diterapkan pemerintah guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, mekanisme pencairan dana yang dilakukan secara bertahap dengan persyaratan target belanja tertentu mendorong pemerintah desa untuk mengelola anggaran secara disiplin dan terukur. Sistem ini juga memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat.

Strategi Pengelolaan Dana dan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan rencana prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, desa sering dihadapkan pada hambatan birokrasi seperti keterlambatan penerbitan nota dan dokumen administratif lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa menerapkan strategi penyelesaian cepat dalam proses pembayaran agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambat dan pertanggung jawaban anggaran tetap tertib. Strategi ini penting diterapkan guna mencegah potensi penyalahgunaan dana sekaligus mempercepat proses pembangunan tanpa mengurangi akuntabilitas.

Koordinasi Internal Pemerintah Desa

Koordinasi antarpemangku kepentingan internal menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pengelolaan Dana Desa. Pertemuan rutin setiap tiga bulan antara kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan bidang dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian pembangunan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah perbaikan. Komunikasi yang terjalin secara intensif membantu mendorong terciptanya sinergi antarperangkat desa dan memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi ini juga memperkuat integritas tata kelola desa dan meningkatkan kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

Kendala dan Hambatan dalam Pembangunan Desa

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Isnaini et al., 2019), meskipun dana desa pertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali terdapat hambatan dalam penerapan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pelaksanaan pembangunan desa tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas penggunaan Dana Desa. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang terjadi secara mendadak sering menjadi hambatan karena memaksa desa melakukan penyesuaian ulang terhadap rencana pembangunan yang telah dirumuskan. Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan, sehingga memunculkan ketidakpuasan di tingkat warga. Banyaknya aturan birokrasi dan campur tangan pemerintah juga membatasi fleksibilitas desa dalam menentukan prioritas pembangunan. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan menurunkan efektivitas pembangunan desa secara keseluruhan.

Peran Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Mendukung Keberlanjutan Pembangunan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan pembangunan desa, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan fisik. Sangat penting bagi pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat saat merencanakan dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana agar kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi (Putra, 2023). Keterlibatan ini tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga melibatkan kontribusi teknis melalui penggerahan tenaga kerja dan waktu sesuai kesepakatan bersama. Mekanisme tersebut memungkinkan masyarakat terlibat langsung dalam proses pembangunan sehingga hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di lapangan. Selain itu, keterlibatan aktif dalam pelaksanaan turut membangun rasa memiliki yang lebih kuat terhadap Sarana dan Prasarana yang dibangun, sehingga mendorong masyarakat untuk ikut menjaga serta memanfaatkannya secara optimal.

Efektivitas pembangunan desa dapat dievaluasi dari sejauh mana Sarana dan Prasarana yang telah disediakan mampu digunakan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemanfaatan yang cepat dan merata menunjukkan bahwa pembangunan telah tepat sasaran dan menjawab kebutuhan warga. Sebaliknya, apabila suatu Sarana dan Prasarana tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, hal tersebut menjadi indikator perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan, kesesuaian lokasi, sosialisasi, atau kualitas pembangunan itu sendiri. Evaluasi ini penting agar desa dapat memperbaiki strategi pembangunan pada periode berikutnya dan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Tantangan dalam perawatan Sarana dan Prasarana menjadi isu yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan desa. Meskipun peran masyarakat dalam pemeliharaan fasilitas telah mengalami peningkatan, kesadaran untuk menjaga keberlangsungan Sarana dan Prasarana masih perlu diperkuat, terutama pada Sarana dan Prasarana jalan yang sering mengalami kerusakan akibat kendaraan berat. Untuk mengatasi hal tersebut, warga dan kelompok petani biasanya melaksanakan kegiatan perawatan melalui kerja bakti atau gotong royong secara berkala. Namun, upaya ini memerlukan dukungan berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat agar perawatan tidak bersifat sementara, tetapi menjadi budaya kolektif dalam menjaga aset desa.

Selain pembangunan fisik, pemerintah desa menekankan pentingnya pembangunan mental dan kesadaran masyarakat sebagai pondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. Nilai-nilai seperti kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan kedulian sosial harus terus dibangun agar warga mampu menjaga serta memanfaatkan Sarana dan Prasarana secara bijaksana. Pembangunan mental ini memerlukan proses panjang karena berkaitan dengan perubahan perilaku, kebiasaan, dan pola pikir masyarakat. Namun, apabila kesadaran tersebut tumbuh kuat, maka pembangunan desa tidak hanya menjadi sekadar penyediaan fasilitas, tetapi juga menjadi proses pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian dan kemajuan jangka panjang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dana Desa menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, mushola, punden, makam leluhur, serta program sanitasi. Pembangunan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas warga, efisiensi aktivitas ekonomi, dan produktivitas pertanian. Pengelolaan Dana Desa dilakukan

secara terencana, transparan, dan partisipatif melalui mekanisme musyawarah desa, penyesuaian dengan regulasi, serta pelaporan keuangan yang akuntabel. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi hambatan seperti perubahan kebijakan pemerintah, keterbatasan anggaran, serta tantangan administratif. Selain itu, partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas desa menjadi faktor penentu keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Saran

Saran dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami regulasi dan tata kelola Dana Desa agar proses perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan dapat berjalan lebih efektif serta tidak terhambat oleh kendala administratif. Pemerintah desa juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi internal serta menyusun perencanaan pembangunan yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan program agar sesuai dengan hasil musyawarah dan prioritas desa. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan fasilitas desa agar Sarana dan Prasarana yang terbangun dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Pemerintah pusat maupun daerah juga diharapkan lebih stabil dalam menetapkan regulasi terkait Dana Desa dan memberikan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa di masa mendatang dapat berjalan lebih efektif, inovatif, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. (2023). *Kecamatan Pare dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Kediri.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2025). *Pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024* [Press release]. BPS Kota Kediri.
- Harianto, K. (2021). Analisis potensi ekonomi dalam menetapkan rencana pembangunan Kabupaten Kediri di tengah pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(3), 49–63. <https://doi.org/10.29407/jae.v6i3.16553>
- Hidayah, I., & Mukhlis, I. (2019). Dana Desa on clean water and sanitation access in Indonesia: Does cash-for-work (PKT) matter? *Economic and Finance Letters*, 12(1). <https://doi.org/10.20472/efc.2019.012.008>
- Isnaini, I., Rustiana, D., Aini, E. N., & Luthfi, A. (2019). Obstacles and opportunities of community-based Dana Desa management (Case study: Kalisidi Village, West

Ungaran Subdistrict, Semarang Regency). *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/icorsia-18.2019.41>

Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis dampak pengelolaan dan penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6(1), 14–24. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2022). *Pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa*. Kemendesa PDTT.

Malik, E. (2023). Pelatihan manajemen pengelolaan BUMDes. *Sabangka*, 2(2), 329–333. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v2i02.553>

Maulana, M. I. (2023). Analysis of agricultural economic development in East Java Province. *Jurnal Bina Praja*, 15(3), 593–604. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.593-604>

Mustofa, A. (2023). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo. *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik*, 9(1), 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>

Putra, K. W. (2023). Perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Governance and Local Politics*, 5(2), 245–253. <https://doi.org/10.47650/jglp.v5i2.958>

Putra, R. A., & Nugroho, S. (2020). Peran pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 12(2), 145–156.

Putra, Y. P., Sudarmiati, & Wardana, L. W. (2023). Linkage between tourism and agricultural micro and small enterprises in Kediri (East Java–Indonesia). *RISK: Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi*, 4(2). <https://doi.org/10.30737/risk.v4i2.5207>

Rahmatullah, A. F. (2021). Good governance dalam pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i1.1531>

Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2024). Optimalisasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan Desa*, 6(1), 33–42.

Solikin, N., Hartono, B., Fanani, Z., & Ihsan, M. (2025). The potential of economic base of the livestock sector in Kediri-East Java. *Journal of Development Research*, 2(1). <https://doi.org/10.28926/jdr.v2i1.48>

Suryani, N., Djatola, H. R., & Wahyono, D. (2021). Pengaruh pemanfaatan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur dan ekonomi desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 201–210.